

PROSES BERTEMUNYA KEPENTINGAN EKONOMI DAN POLITIK DIBALIK KONFLIK ETNIS KALIMANTAN TENGAH

Ach Fawaidi.¹⁾, Ketut Putra Erawan²⁾, Bandiyah³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: ach.fawaidi@gmail.com, ketuterawan@fisip.unud.ac.id², bandiyah@fisip.unud.ac.id²

ABSTRACT

This study explains the conflict ethnic Dayak and Madura in Sampit, Central Kalimantan. The problem discussed is how the meeting of economic and political factors caused a conflict and become one movement against Madura. This research was an explanatory research using qualitative methods. This research used collective action theory and the mobilization structure concept. The results of this research indicated the meeting process occurred when the Dayak political elite was not included in the echelons position I, II, and III in the Regional Government East Kotawaringin which will be inaugurated on February 2001. Those who refuse the inauguration, took advantage of anti-Madura sentiments due to economic disparity. The sentiment was used to mobilize the Dayak into one movement directed into riots. In the meeting process of them showed that there was a link between economic factors and political competition in Sampit.

Keywords: *Economic Interest, Political Interest, Sampit Conflict*

1. PENDAHULUAN

Sejumlah konflik komunal berdarah telah mengguncang beberapa daerah di Indonesia dimasa transisi dari Orde Baru menuju Reformasi. Konflik yang menyebabkan kekerasan sampai kerusuhan tersebut telah merisaukan banyak pihak, selain proses penyelesaian oleh negara yang dinilai lamban, hal lain yang menjadi perhatian adalah jatuhnya korban yang tidak sedikit. Beberapa penjelesan mengenai faktor terjadinya konflik sudah banyak diuraikan dalam berbagai macam penelitian, salah satu yang paling mengemuka yakni proses peralihan otoritarianisme menuju demokrasi diduga sebagai salah satu variabel atas terjadinya konflik. Keadaan ketidakpastian ekonomi, politik dan hukum di masa transisi dari pemerintahan Soeharto ke pemerintah

berikutnya telah menyebabkan gejala lemah dan gagalnya negara dalam menegakkan sistem dan kontrol kepada masyarakat (Cahyono, 2008).

Sejumlah pihak bahkan ada yang mengkaitkan seluruh dampak negatif pembangunan Orde baru seperti kesenjangan ekonomi, ketidakadinal, dan rusaknya jarisan sosial budaya lokal dan tradisional sebagai sumber lain pecahnya konflik ataupun kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah.

Konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah yang melibatkan Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai penduduk asli Kalimantan Tengah (etnis Dayak) berhadapan dengan kelompok pendatang dari Pulau Madura (etnis Madura) menjadi sorotan banyak

pihak. Saling bunuh tidak terhindarkan ketika masing-masing diantara suku sudah tidak saling percaya dan berkeyakinan popularitas suku yang satu menjadi penghambat suku yang lain.

Konflik antar etnis Dayak dan Madura tersebut memuncak dan pecah pada akhir Februari 2001 di wilayah Kalimantan Tengah. Kelompok Dayak dengan senjata busur, panah, dan tombak menyerang Kota Sampit, pelabuhan pengangkutan kayu di pinggiran sungai.

Mereka melakukan penyisiran ke sejumlah tempat yang menjadi tempat tinggal orang Madura kemudian memenggal kepalanya. Menjelang malam berikutnya kelompok Dayak tersebut sudah merambah kota dengan naik-naik truk, dengan perasaan menang mengangkat potongan-potongan kepala dengan darah yang masih menetes. Ratusan sampai dengan ribuan orang Madura yang telah berhasil selamat dalam peristiwa itu berlarian ke kantor pemerintah. Setelah itu, orang Madura dikirim ke tempat asal pulau Jawa hingga Madura.

Sebagian besar dari populasi Madura di Kalimantan tengah dengan jumlah total 120-130.000 telah berhasil keluar dari Kalimantan Tengah khususnya di Sampit. Hanya di Pangkalanbun, dengan populasi Madura yang cukup besar, sebagian besar dari mereka tetap bertahan tinggal. Sebagian besar dari yang pergi tidak pernah kembali ke Kalimantan Tengah. Jumlah korban tewas yang bisa diperkirakan dalam tragedi tersebut berkisar dari 500 sampai 1.300 dan

sebagian besar diantaranya Madura (Klinken, 2007).

Berbagai hipotesis menunjukkan, konflik etnis yang melibatkan suku Dayak dan Madura dilatarbelakangi sejumlah faktor, salah satunya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi diantara kedua etnis. Ruang-ruang publik yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibukota Sampit banyak dikuasai oleh orang Madura. Pelabuhan, pertambangan, pasar, dan hampir semua transportasi di Sampit banyak diambil oleh orang Madura sebagai pemeran utama. Kondisi itu diperparah dengan sikap orang Madura yang dinilai oleh hampir seluruh masyarakat Dayak tidak bisa menghormati tradisi penduduk lokal. Faktor lain yang cukup kuat adalah kepentingan elit dalam ruang-ruang politik. Sejatinya kepentingan itu didasari atas kebijakan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur selama 32 tahun terakhir. Pembangunan tersebut dinilai oleh etnis Dayak tidak berbasis kerakyatan dan tidak berpihak kepada pemberdayaan masyarakat atau penduduk asli (Kompas, 2001).

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penelitian ini akan mencoba menganalisis bagaimana dua kepentingan baik kepentingan ekonomi dan kepentingan politik bertemu dan menyebabkan konflik dan kerusuhan antara etnis Dayak dan Madura menjadi sangat masif dan tidak bisa dikendalikan pada saat konflik pecah 18 Februari 2001.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori *Collective Action*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *collective action* yang dikemukakan oleh Charles Tilly. Dalam teori tersebut dijelaskan tentang gerakan sosial secara bersama-sama *collective* untuk tujuan tertentu (Wesley, 1978: 10).

Dalam teori itu, Charles Tilly mengungkapkan bahwa suatu gerakan sosial bisa terjadi karena memiliki tujuan untuk mengadakan sebuah perubahan dalam interaksi-interaksi yang mengundurkan persetujuan berkelanjutan antara warga melawan kelompok-kelompok yang memiliki kuasa lebih pada suatu sistem tertentu (Michigan, 1978: 4).

Tilly menjelaskan, untuk bisa menjelaskan *collective action* tersebut ada sejumlah komponen yang meliputi beberapa hal yang harus dipahami secara utuh, yakni kepentingan yang merupakan dasar dari sebuah aksi *collective* bisa terjadi, organisasi yang merupakan kesatuan orang yang memiliki kepentingan yang sama, dan mobilisasi yang merupakan pengorganisasian orang-orang yang telah bersatu dalam satu kontrol untuk memudahkan dalam melakukan suatu pergerakan untuk menekan penguasa atau Negara agar terjadi perubahan.

Terdapat 4 konsep yang bisa dipakai untuk menganalisis gerakan *collective*, yaitu struktur mobilisasi (*mobilizing structure*), peluang politik (*political opportunity*), proses pembingkai (*framing process*) dan repertoire persetujuan (*repertoire of contention*) (Tilly, 2004: 14)

Dalam penelitian ini, konsep yang dipakai adalah konsep struktur mobilisasi atau *mobilizing structure*. Konsep struktur mobilisasi mampu menganalisis persoalan dan ketegangan sosial sebagai hal yang sangat melekat di dalam satu masyarakat. Maka dari itu, perspektif mobilisasi struktur tersebut mengajukan sebuah tesis baru yakni tentang organisasi-organisasi gerakan memberikan struktur mobilisasi vital terhadap aksi *collective* dalam bentuk apapun. Pendekatan ini menyebutkan bahwa gerakan sosial terjadi sebagai bentuk konsekuensi dari pertemuan para aktor dengan menggunakan cara rasional sesuai dengan kepentingan mereka, serta ada peran organisasi, kader, dan pemimpin untuk melakukan mobilisasi.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif. Penelitian secara eksplanatif menjelaskan alasan suatu hal, atau hubungan yang ada antara beberapa hal. Penelitian secara eksplanatif ini fokus pada isu seputar bagaimana sesuatu hal dapat bekerja serta dapat berkontribusi untuk memahami hasil (*outcomes*) dengan mengidentifikasi tipe-tipe efek yang berbeda atau konsekuensi yang timbul dari sebuah kebijakan hingga terjadinya konflik. (Ritchie, 2003: 5).

Penulis juga menentukan unit analisa berupa salah satu tokoh Dayak ataupun tokoh Madura yang menjadi saksi sejarah konflik. Penentuan unit analisis ini berdasarkan kepada pertimbangan objektif bahwa sebagai indikator untuk menemukan bagaimana dua kepentingan itu bertemu,

penulis harus mencari setidaknya tokoh yang menjadi saksi sejarah antara keduanya baik pihak Dayak dan Madura.

Sejumlah informan telah penulis pilih untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian yang telah penulis ajukan di pendahuluan. Beberapa informan seperti, Najmi Fuadi yang merupakan tokoh Dayak yang saat penulis wawancara menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, Mambang I Tubil yang juga tokoh dayak yang saat penulis wawancara menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari tokoh Madura ada Abdul Wahid sebagai pemahaman penulis secara utuh untuk bisa memahami konflik dari sudut pandang orang Madura. Selain tokoh dari dua suku tersebut, penulis juga mewawancarai seorang wartawan yang pada saat konflik melaksanakan liputan dari awal sampai proses perdamaian dilakukan.

4. PEMBAHASAN

Kedatangan Etnis Madura Ke Kalteng

Sebagian besar pendatang dari Madura di Kalimantan berasal dari Bangkalan dan Sampang, dua kabupaten paling barat dan termiskin di Madura. Sama seperti orang Jawa dan kelompok-kelompok penduduk lain, yang sering direkrut oleh pemerintahan colonial atau Indonesia, orang Madura cenderung bermigrasi dalam proyek transmigrasi oleh pemerintah. Selain melalui program tersebut, orang Madura juga bermigrasi ke Kalimantan secara swakarsa.

Migrasi orang Madura ke Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah

dibagi menjadi tiga periode, orde lama, orde baru, dan reformasi. Pada masa yang pertama yakni orde lama, aspek yang melatari transmigrasi yaitu demografis dan memiliki tujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Pada masa setelahnya yakni Orde Baru, orang-orang Madura yang bermigrasi ke Kalimantan Tengah dimulai pada program Pelita I dan secara besar-besaran terjadi pada Pelita II—VI. Jumlah imigran Madura terus mengalami peningkatan disetiap program Pelita tersebut.

Ketika program transmigrasi ditinggalkan di tahun 2000, jumlah penduduk yang berasal dari proses transmigrasi menjadi 21% dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada saat itu. Ada tiga Kabupaten yang menjadi tempat penduduk hasil dari transmigrasi tersebut, diantaranya di Kabupaten Kapuas 43%, Kabupaten Kotawaringin Barat 24%, dan Kabupaten Kotawaringin Timur 22%.

Interaksi dengan Penduduk Lokal

Kehidupan sebagian orang Madura di Kalimantan Tengah dinilai cenderung eksklusif. Namun, kecenderungan untuk hidup eksklusif tersebut tidak menjadi persoalan sebelum tahun 1950, karena pada masa tersebut hubungan atau interaksi orang Madura dengan penduduk setempat masih terjalin dengan baik. Setelah tahun 1950 tersebut, interaksi transmigran Madura dengan penduduk lokal yakni suku Dayak mulai terlihat benturan nilai dan budaya. Dalam interaksi dengan warga sekitar, kebanyakan Orang Madura dianggap sangat tempramental dan

sering membawa senjata tajam kemana pun mereka pergi. Apabila terjadi konflik dengan orang lain, mereka sering menggunakan cara kekerasan dan mengedepankan kemarahan.

Kerukunan antara kedua kelompok etnis ini semakin tercoreng ketika imigran Madura tahun 1990-an mulai berdatangan. Pada tahun tersebut, mayoritas orang Madura yang datang ke Kalimantan Tengah pada masa ini dianggap sebagai preman atau mereka yang suka melakukan tindak kekerasan. Mereka melakukan migrasi bukan hanya karena faktor tekanan kemiskinan atau untuk memperbaiki nasib, tetapi karena tindakan kriminal yang mereka lakukan sehingga mendapat penolakan di tempat asal mereka. Para preman ini dianggap mengganggu kerukunan antara orang Dayak dan Madura yang telah terjalin baik selama puluhan tahun.

Kepentingan Ekonomi

Kedatangan etnis Madura ke Kalimantan Tengah telah mampu membuat banyak kehidupan dalam sektor ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu Kota Sampit mulai bergeser. Sikap gigih yang ditunjukkan oleh orang Madura ketika berada di tanah rantau khususnya di Sampit telah banyak menjadikan mereka menguasai sektor-sektor strategis di bidang ekonomi yang ada di Sampit.

Di Sampit, ada Haji Satiman yang merupakan pemilik dari Hotel Purnama. Sementara di Palangkaraya, pemilik perusahaan transportasi yang sangat sukses, PO Maduratna Persada, juga

warga keturunan Madura. Dari tiga pasar di Palangkaraya, Payangsari, Kahayan, dan Kameluk hampir 40% pedagangnya berasal dari etnis Madura. Malah, dalam hal perdagangan sayur-mayur, orang Madura menguasai hingga 80%. Hanya di sektor pertambangan dominasi etnis ini tak terjadi, sebab etnis Madura baru belakangan terjun ke bidang ini.

Penguasaan orang Madura dalam sektor ekonomi sebenarnya tidak hanya dilakukan satu dua orang saja. Ada orang Madura yang sudah ditohokan di Sampit berhasil membangun "kerajaan bisnis". Bahkan, di sejumlah organisasi pengusaha seperti asosiasi pengusaha konstruksi, asosiasi pengadaan barang, dan Kamar Dagang dan Industri-setempat pun sejumlah tokoh Madura menjadi motor, atau setidaknya eksistensinya sangat terasa. Penguasaan dalam sektor ekonomi tersebut telah banyak membuat masyarakat Madura di Sampit menunjukkan sikap berkuasa (Kompas, 2001).

Kepentingan Politik

Sejak Kalimantan Tengah menjadi Provinsi pada 23 Mei 1957, sederet pekerjaan rumah bagi para elit politik lokal terus menumpuk untuk segera dikerjakan, salah satu yang paling dirasakan hampir seluruh penduduk asli Kalimantan Tengah yakni eksistensi masyarakat Dayak yang adalah mayoritas di Provinsi Kalimantan Tengah, adalah kelompok masyarakat yang menjadi kelompok minoritas di tanah sendiri. Eksistensi itu tentu juga dalam hal dunia politik yang selama itu dinilai tidak ramah dengan penduduk lokal.

Menjawab persoalan eksistensi tersebut, pada tanggal 15 Mei 1992 diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat untuk mewujudkan kesadaran betapa pentingnya menjadi mayoritas di wilayah sendiri. Inti dari pertemuan tersebut adalah terbentuknya tim formatur yang terdiri atas mantan Gubernur W.A. Gara sebagai penasehat, Prof. KMA M. Usop, M.A., sebagai ketua, Dr. Cornelis Rintuh sebagai sekretaris, dan W.A. Narang, Dase Durasyid, Drs. A.D. Leiden, dan Lewis KDR, B.A., sebagai anggota ditubuh tim formatur (Haridison, 2017:68).

Tim formatur tersebut bertugas untuk menyelenggarakan sebuah seminar kebudayaan untuk melahirkan suatu lembaga swadaya masyarakat. Seminar itu diselenggarakan bertepatan dengan HUT Kalimantan Tengah ke 37 dengan tema "Kebudayaan Dayak dan Peringatan 100 Tahunan Rapat Damai Tumbang Anoi". Rekomendasi dari seminar tersebut adalah kesepakatan didirikan suatu organisasi LSM yang bernama Lembaga Musyawarah Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah (LMMDD-KT).

Perjuangan eksistensi masyarakat Dayak akhirnya mencapai puncaknya setelah lima tahun kemudian. Tepatnya pada tahun 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri di tengah-tengah protes jalanan besar-besaran. Pergulatan dan desakan terhadap agenda demokrasi di berbagai tempat pada akhirnya dipenuhi oleh pemerintah pusat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah, atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah.

Kesempatan untuk senantiasa dan memperjuangkan eksistensi penduduk lokal mulai dirasakan di Kalimantan Tengah. Tokoh Dayak yang sangat erat kaitannya dengan LMMDD-KT sangat merasakan kesempatan formal tersebut menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan kesempatan informalnya. Termasuk yang paling mengemuka untuk memanfaatkan kesempatan itu yakni ketua dari LMMDD-KT sendiri yakni Prof. K.M.A. Usop. Sebagai orang yang pernah berkecimpung dalam di dunia akademik dan jurnalistik, Usop dipandang begitu terhormat. Apalagi dia pernah menjadi Rektor di salah satu Universitas Negeri di Palangkaraya, selain itu, dia juga menjadi juru bicara tingkat Provinsi untuk mesu pemilu dari partai Golkar saat itu.

LMMDD-KT pada kenyataannya masuk dalam katagori partai politik lokal. Idiologi yang dianut tentu idiologi kepribumian yang secara khusus difokuskan pada pada kontrol terhadap birokrasi, organisasi tersebut juga sangat menentang bahasa teknokratis kepemimpinan Soeharto dengan sebuah bahasa hak-hak ulayat, dan formalisme-formalisme anti-politisnya. Misi LMMDD-KT dalam jangka pendek adalah untuk merebut kursi Gubernur Kalimantan Tengah.

Ketika saat semakin mendekati pada bulan Januari 2000, ketika parlemen provinsi akan memilih gubernur yang tctap, LMMDD-KT luar biasa sibuk di luar gedung parlemen. Ketuanya, Prof. Usop termasuk di antara calon-calon gubernur. Organisasi

itu mempunyai cabang-cabang di setiap kabupaten, maupun sebuah jaringan organisasi-organisasi mitra berdasarkan etnis Dayak. Organisasi itu mengancam akan mengancam “ratusan ribu demonstran, dari pedalaman yang paling terpencil sampai kata-kota besar,” untuk menentang dua calon yang tidak mereka sukai (Kompas, 1999).

Pemilihan gubernur di Kalimantan Tengah akhirnya berlangsung, meski cukup alot, jalannya pemilu tersebut ternoda oleh sebuah tuduhan yang mengatakan ada jual beli suara dalam pemilihan. Pada saat proses panjang dan bahkan memerlukan tiga putaran pemilihan secara terpisah, Asmawi Agani yang menjadi wakil dari Golkar mampu mengalahkan tokoh yang sangat disegani di Kalimantan Tengah yakni Usip yang mewakili LMMDD-KT. Rincian suaranya sangat tipis yakni 24 untuk Asmawi dan 20 untuk Usop. LMMDD-KT seolah tidak memiliki modal yang kuat untuk pertarungan yang mengusung ketua mereka.

Setelah hura-hura pemilihan Gubernur berlalu, dan Asmawi Agani memimpin Kalimantan Tengah, LMMDD-KT secara otomatis mengadopsi peranan suara masyarakat dalam oposisi terhadap Gubernur Asmawi Agani. Organisasi itu akhirnya memindahkan dukungannya di belakang seorang kandidat untuk bupati di Kotawaringin Timur, yang ibukotanya adalah Sampit dan meraih sukses. Tetapi, hubungannya kemudian berubah menjadi masam dalam waktu satu tahun ketika bupati yang baru menolak untuk

memberikan imbalan pada para pendukung etnisnya.

Proses Bertemuanya Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Politik

Poin-poin atau faktor ekonomi tersebut mencapai puncaknya ketika pada pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang resminya akan dijalankan pada 1 Januari 2001 setelah dikumandangkan pada tahun 1999. Pada saat itu, kepentingan politik mulai terasa setelah elit-elit politik di Kabupaten Kotawaringin Timur sangat ambisius untuk menduduki jabatan-jabatan strategis yang akan dilantik pada tanggal 19 Februari 2001. Selama proses itu, suara elit politik yang ambisius tadi sama sekali tidak didengarkan. Namun ketika elit-elit itu menyebut nama suatu etnis sebagai musuh bersama, mereka mendapat perhatian setidaknya dari kalangan masyarakat Dayak kelas bawah.

Situasi seolah memihak setelah pada tanggal 15 Desember 2000 terjadi perkelahian di tempat hiburan di desa Ampalit, Kareng Pangi. Sebuah desa yang menjadi lokasi pertambangan. Perkelahian ini mengakibatkan seorang pria beretnis Dayak bernama Sendung meninggal dengan sejumlah luka tebasan celurit. Pelaku pembunuhan berjumlah tiga orang, ketiganya berasal dari etnis Madura. Kematian Sendung akan menjadi urusan polisi biasa yang sama sekali tidak menonjol andaikata elit politik yang masuk dalam organisasi LMMDD-KT tidak menggembarkan-gemborkannya sebagai pemicu pertikaian. Mereka mengeluh

tentang polisi yang tidak berbuat apa-apa atas kematian Sendong dan mengisyaratkan bahwa kematian itu diakibatkan oleh kelalaian polisi yang digerakkan secara rasial. Tokoh-tokoh terkemuka dalam LMMDDKT pergi berkeliling ke Kereng Pangi bersama gubernur. Selain itu, Untuk menanggapi perihal ketegangan yang terjadi di Kereng Pangi tersebut, diadakan rapat oleh pihak-pihak dari etnis Dayak di Hotel Rama, Sampit pada 18 Desember 2000. Rapat yang dipimpin oleh Fedlik Asser, perwakilan dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur, ini membahas mengenai pernyataan sikap orang-orang Dayak terhadap peristiwa yang terjadi di Kereng Pangi tersebut. Bahkan pertemuan itu, tokoh dayak atas nama Sabran Achmad yang merupakan seorang veteran perjuangan 1957, menghubungkan kematian Sendong yang ditengarai dibunuh oleh etnis Madura dihubungkan dengan agenda LMMDD-KT tentang kendali birokrasi di tangan Dayak.

Ketika tiba momen kunci pada februari tahun 2001 untuk memaikan peranan yang lebih signifikan dalam pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur, LMMDD-KT menghadapi sebuah persoalan besar. Deretan pembantu-pembantu Bupati Kotawaringin Timur yang akan dilantik pada 18 Februari 2001 ternyata tidak menyertakan Sekretaris LMMDD-KT Cabang Kotawaringin Timur yakni Fedlik Asser. Pejabat muda yang sangat ambisius untuk menjadi Skretaris Daerah Kabupaten itu tidak ada dalam daftar yang akan dilantik. Seorang pejabat lain yang belakangan juga tidak terima

dengan pelantikan itu adalah ipar Fedlik, yakni Lewis yang juga merupakan pejabat di Dinas Kehutanan Kotawaringin Timur.

Keduanya berusaha keras untuk mengagalkan proses pelantikan itu, sentimen anti Madura yang dari dulu memang menjadi isu sensitive lantaran orang Madura banyak menguasai sektor ekonomi dan memiliki sifat yang keras digunakan untuk menyulut konflik dan menggerakkan orang dayak secara collective.

Analisis Hasil Temuan Dengan Landasan Teori

Melalui analisa di lapangan dengan teori yang dipilih oleh penulis, apa yang digunakan oleh elit Dayak untuk menyulut konflik yang lebih besar sebenarnya sangat sesuai dengan teori Collective Action yang dikemukakan oleh Charles Tilly dari Universitas Michigan. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa gerakan tidak bisa dilepaskan dari komponen yang saling berhubungan yang sudah memiliki kesamaan nasib atau persepsi tentang suatu hal yang dirasa tidak adil dan itu dilakukan oleh kaum penguasa atau orang-orang yang dinilai memiliki keuntungan lebih besar, baik itu negara atau pihak swasta atau orang-orang yang memiliki kekuatan di dalam sebuah system.

Sedangkan konsep struktur mobilisasi berkaitan erat dengan hasil temuan dilapangan yang mengatakan bahwa persoalan sosial yang menimbulkan ketegangan sebagai sesuatu yang hampir selalu melekat dalam kelompok masyarakat. Selain itu selalu ada

ketikapuasan yang kerap kali selalu menghasilkan protes. Organisasi gerakan yang juga telah disebutkan di kajian teori senantiasa memberikan struktur mobilisasi yang sangat penting untuk sebuah aksi kolektif dalam bentuk apapun. Tentu hal tersebut sangat berkaitan dengan organisasi masyarakat Dayak yang telah disebutkan diatas sebagai upaya menggerakkan masa yang lebih besar untuk menyulut konflik agar timbul sebuah kerusuhan dengan tujuan-tujuan tertentu, termasuk mengagalkan pelantikan pejabat eselon yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

5. KESIMPULAN

Konflik yang menyebabkan kerusuhan antara etnis Dayak dan Madura sejatinya sudah berlangsung sejak lama dan mulai terlihat ke permukaan ketika masa orde baru. Ketegangan antara kedua kelompok etnis tersebut dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, kesenjangan sosial dan pergesekan nilai budaya yang kemudian meluas kepada kepentingan politik. Ketika Orde Baru runtuh, dua faktor yang paling nyata adalah faktor ekonomi dan politik. Perjalanan kedua faktor tersebut sejatinya berjalan secara terpisah. Kepentingan ekonomi menjadi faktor yang yang berkepanjangan dari masa orde baru dan tidak berkesudahan. Kepentingan itu baru mencapai puncaknya setelah ada kepentingan politik yang hadir sebagai reaksi atas ketidakberpihakan sistem politik terhadap penduduk lokal.

Proses pertemuan kedua faktor itu terjadi manakala ada segelintir elit yang

mengharapkan perubahan dalam tataran sistem politik, namun mereka tidak memiliki cara untuk melakukannya. Akhirnya faktor ekonomi yang sebelumnya memang sudah menjadi bahan krusial dipakai dan dijadikan satu kekuatan dengan faktor politik untuk membuat gerakan dan menyulut konflik yang lebih besar.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Wahid, (2004) *Berdamai dengan sejarah*, Yogyakarta: Alenia Press.
- Haridison, (2017) *Civil Society: Eksistensi Kelembagaan Masyarakat Dayak di Era Pasca Reformasi*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo
- Tilly, C. (1978) *Studying Social Movement*, Michigan: University of Michigan.
- McAdam, Tarrow, & Tilly, (2004) *Dynamics of Contention*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Dona & Mario D, (2006) *Social Movements an Introduction*, Edisi Kedua, (Malden: Black Well Publishing Ltd
- Cahyono H, (2008) *Konflik Kalbar dan Kalteng: Jalan Panjang Meretas Perdamaian*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Jonge H.D, (2012) *Garam Kekerasan dan Aduan Sapi*, Yogyakarta, LKIS

JURNAL:

- Shumake A, (2008) *Kekerasan Komunal Pasca-Kekuasaan Soeharto: Faktor-Faktor yang Memicu*

- Konflik Antar-Kelompok di Kalimantan dan Maluku*, Jurnal Volume V No. I
- Achwan R, (2005), *Overcoming Violent Conflict: Volume 1 Peace and Development Analysis In West Kalimantan, Central Kalimantan, And Madura*, Jakarta: Crisis Prevention and Recovery Unit (CPRU).
- ICG , (2001) *Communal violence in indonesia: Lessons from kalimantan*, Asia Report 27 Juni 2001
- KORAN:**
- Kompas, (2001), *Tiga Faktor Utama Sumber Konflik*.
- Kompas, (2001), *Warga Madura Masih dibutuhkan*.
- Kompas, (2001) *Dendam Dayak Bisa Tujuh Turunan*.
- Kompas, (2000) *Pelantikan Gubernur Kalteng Bisa Tertunda*.
- Kompas, (2000), *1.335 Warga Asal Madura Diulangkan*,
- Kompas, (2001), *Dendam yang Tak Kunjung Padam*.
- Kompas, (2001), *Orang Madura di Rantau: Abantal Ombek Asapo' Angin*.
- Kompas, (2001), *Gerbang Ekonomi Kalteng Itu Tinggal Kenangan*.
- Kompas, (1993), *Gubernur Kalteng Terkurung 2,4 Jam di Kantor DPRD*.
- Kompas, (1994), *Warsito Terpilih sebagai Gubernur Kalteng 1994-1999*.
- Kompas, (1999), *Pencalonan Gubernur Kalteng Menghangat*.
- Kompas, (2001), *Gubernur Kalteng Amankan Aset Milik Pengungsi*,
- Kompas, (2000), *Kotawaringin Timur Rusuh: 1 Orang Tewas dan Sembilan Rumah Terbakar*.
- Kompas, (2000), *Situasi Ampalit Masih Mencekam: Warga Mengungsi ke Markas Polda Kalteng*.
- Kompas, (1999), *Daerah Sekilas: Otonomi daerah sebagai implementasi UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah*
- Kompas, (2001), *Enam Provokator Sampit Ditangkap Korban Tewas Tambah Dua Orang*.
- Kompas, (2001), *Sampit bersih dari tindak kekerasan perayaan idul adha berjalan lancar*.
- Tempo, (2001), *Konflik Sampit Tidak Berdiri Sendiri. Bersifat Laten dan Bisa Menjadi Wabah*.
- Tempo, (2001), *Darimana Datangnya Rusuh*.
- Tempo, (2001), *Mencari akar mencari jawaban*.